



Laporan Perencanaan Pembangunan Sektor ESDM

2013

**PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (B A P P E D A)
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213**



DAFTAR ISI

BAB 1.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Penyelenggaraan	4
1.3 Maksud & Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Pembahasan.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI SEKTOR ESDM DIY.....	5
BAB III KEBIJAKAN, SASARAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM	5
BAB IV KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM	5
BAB 2.....	6
KONDISI SEKTOR ESDM DI DIY.....	6
2.1 Kinerja sektor ESDM Terhadap RPJMD.....	6
2.2 Permasalahan pembangunan sektor ESDM	9
BAB 3.....	12
KEBIJAKAN, SASARAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM.....	12
3.1 Visi, Misi, dan Tema Pembangunan Daerah	12
3.2 Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Sektor Cipta Karya.....	18
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Sektor Cipta Karya.....	24
BAB 4.....	26
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM	26
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	26
Pendanaan Pembangunan Sektor Cipta Karya.....	29
Perubahan APBD tahun 2013.....	31

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG



Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Dokumen RPJMD DIY Tahun 2013-2017 merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara resmi disampaikan usai dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017.

RPJMD Tahun 2013-2017 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah; yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan semangat keistimewaan di dalamnya dan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

RKPD mempunyai peran sebagai pedoman dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara dan selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Estimasi Jumlah penduduk DIY tahun 2011 berdasarkan sensus tahun 2010 tercatat berjumlah 3.487.325 jiwa. Dengan presentase menurut daerah, penduduk kota mencapai 66,36% sedangkan penduduk desa sebesar 33,64%. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2011 sebesar 0,86% relative lebih rendah dari tahun sebelumnya. Menurut wilayah kabupaten Sleman dan Bantul memiliki angka pertumbuhan diatas rata-rata provinsi masing-masing sebesar 1,07% & 1,30%. Dengan luas wilayah 3.185,80 km², maka kepadatan penduduk DIY adalah 1.095 jiwa per km². Kepadatan tertinggi ada dikota Yogyakarta yakni 12.017 jiwa per km² dengan luas wilayah hanya sekitar 1% dari luas provinsi DIY. Sedangkan Gunungkidul yang memiliki luas wilayah terluas yaitu 46,63% memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 456 jiwa per km².

Berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian provinsi DIY pada tahun 2011 tumbuh sebesar 5,16%, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,88%. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi DIY diperkirakan dapat lebih cepat karena sampai pada semester 1 sudah mencapai 5,79%. Penyumbang positif terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16%, adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20,84% diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 17,25%, kemudian sektor pertanian 16,07% dan industri pengolahan 13,48%.

Berdasarkan data tersebut diatas dimana pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, serta adanya perubahan paradigma kebijakan oleh kepala daerah yaitu “among tani dagang layar” dan banyaknya wacana mega

proyek yang akan dibangun di DIY seperti pembangunan bandara baru, pembangunan pelabuhan Tanjung Adi Karta, penambangan pasir besi, dsb memerlukan antisipasi ketersediaan dan stabilitas pasokan energi. Belum lagi adanya kewajiban dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah yang belum terjangkau listrik atau daerah terpencil juga harus dipenuhi.

1.2 DASAR PENYELENGGARAAN

Dasar penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3952) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Provinsi DIY Tahun 2013;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda DIY Nomor 29/DPA/2013 tanggal 16 Januari 2013.

1.3 MAKSUD & TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya swakelola ini adalah untuk melakukan kajian perencanaan sektor energi dan sumber daya mineral yang diharapkan dapat menjadi arah dan panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun n+1 agar tetap terjaga sesuai dengan target yang diterapkan dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

1.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Laporan tenaga ahli swakelola sektor ESDM ini terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini secara ringkas dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan laporan, dasar penyelenggaraan laporan, maksud & tujuan laporan serta sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI SEKTOR ESDM DIY

Bab ini menjelaskan tentang kondisi umum sektor ESDM di DIY, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan di sektor ESDM.

BAB III KEBIJAKAN, SASARAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM

Bab ini berisikan tema dan prioritas pembangunan daerah, kebijakan dan sasaran pembangunan sektor ESDM, serta rencana program dan kegiatan pembangunan sektor ESDM.

BAB IV KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM

Bab ini menyajikan arah kebijakan ekonomi daerah, pendanaan pembangunan sektor ESDM, dan perubahan APBD tahun 2013.

BAB 2

KONDISI SEKTOR ESDM DI DIY

2.1 KINERJA SEKTOR ESDM TERHADAP RPJMD

Urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM), memiliki peran didalam memfasilitasi dan menyediakan pasokan energi dan sumber daya mineral antara lain melalui penyediaan listrik perdesaan, pengembangan energi baru terbarukan dan penyediaan air bersih melalui pemboran air tanah dalam.

Ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Rasio elektrifikasi adalah jumlah total rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga yang ada.

Peningkatan rasio elektrifikasi di DIY per tahun sekitar 1%. Rasio elektrifikasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rasio Elektrifikasi di DIY
2010-2012

Tahun	Rasio Elektrifikasi (%)	Peningkatan dari tahun sebelumnya (%)
2010	75,04	0,81
2011	76,21	1,17
2012	76,80	0,59

Sampai tahun 2012, kondisi kelistrikan di DIY menunjukkan ratio desa berlistrik mencapai 100%, ratio dusun berlistrik sebesar 94,13% atau masih terdapat 238 dusun dari total 4058 yang sebagian besar KK nya belum berlistrik. Pada akhir

tahun 2011, ratio elektrifikasi DIY adalah sebesar 76,21%. Pada tahun 2012, jumlah RT tercatat 1.037.976 rumah tangga dan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD, terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,023% dari target sebesar 0,015 %. Sedangkan melalui dana APBN terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,564%. Secara keseluruhan total ratio elektrifikasi pada tahun 2012 tercapai 76,80%, meningkat sebesar 0,59% dari tahun 2011.

Sementara itu dalam cakupan keterjangkauan listrik, rasio elektrifikasi masih menunjukkan ketimpangan. Rasio elektrifikasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sleman yang mencapai 92,08%. Sedangkan yang terendah dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo yang hanya sekitar 60,92% di tahun 2011. Hal yang menarik adalah bahwa Kota Yogyakarta yang notabene didominasi kawasan perkotaan hanya mencapai rasio sebesar 75,82% yang berada di bawah kabupaten Bantul yang mencapai 81,96%.

Untuk energi baru terbarukan dengan memanfaatkan tenaga air, surya dan biogas, dibangkitkan tenaga listrik sebesar 106 kw dari keseluruhan potensi energi baru dan terbarukan di DIY yang diperkirakan kurang lebih sebesar 10 mw. Sampai dengan tahun 2011, total jumlah energy baru terbarukan yang dapat dibangkitkan sebesar 582,3 kw dari total potensi 10.000 kw (10 MW). Kapasitas energi listrik yang telah dibangkitkan melalui program dan kegiatan APBD dan APBN di DIY pada tahun 2012 sebesar 47 kw, sehingga total telah dibangkitkan energi sebesar 629,35 kw yang berasal dari sumber baru terbarukan.

Pengelolaan air tanah di provinsi DIY meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, yaitu Cekungan Air Tanah Yogyakarta-Sleman. Melalui dana APBN dan APBD DIY, pendayagunaan air tanah dilakukan dengan pembuatan sumur bor air tanah dalam yang berada di daerah sulit air yaitu daerah dengan kedalaman muka air tanah dalam dan fluktuasi air tanah tinggi. Upaya konservasi air tanah dilakukan dengan membuat sumur peresapan air hujan dan sumur pantau yang dilengkapi alat pantau permukaan air tanah, yaitu automatic water level recording (AWLR) berbasis telemetri.

Kegiatan usaha pertambangan di DIY dikelompokkan dalam 3 jenis komoditas tambang, yaitu mineral logam, mineral non logam dan batuan. Mineral logam meliputi mangan dan pasir besi; mineral non logam meliputi fosfat, bentonit, zeolit, dan kaolin, sedangkan batuan meliputi andesit, tanah urug, pasir, sirtu, batu kali, batu gamping, dan breksi batuapung.

Produksi dari 7 (tujuh) mineral non logam dan batuan pada tahun 2011 yang banyak diusahakan di DIY saat ini adalah sirtu/pasir dengan produksi 487.100 m³, batu gamping/kapur dengan produksi 87.486 m³, tanah liat dengan produksi 304 m³, andesit dengan produksi 191.275 m³, zeolit dengan produksi 300 m³, breksi batuapung dengan produksi 525 m³, dan tanah urug dengan produksi 101.648 m³. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011, total peningkatan nilai produksi bahan galian dari 7 mineral logam dan batuan sebesar 396,3 juta rupiah atau meningkat 1,07% dari target sebesar 0,37%. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar didistribusikan melalui 89 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi didistribusikan melalui 9 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji dengan 43 agen dan 2.832 pangkalan. Upaya pemenuhan kebutuhan bahan bakar, dilakukan melalui kegiatan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pada tahun 2011, penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium sebesar 458.064 KL, solar 112.816 KL serta penyaluran bahan bakar gas bersubsidi 52.792,15 Ton, realisasi penyaluran melebihi 1,3% dari besarnya kuota.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012, realisasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tercatat jenis premium 504.632 KL atau 99,7% dari kuota, solar 130.527 KL atau 108,8% dari kuota, serta penyaluran bahan bakar gas bersubsidi 61.961,06 Ton atau 102,8% dari kuota. Kelancaran distribusi Bahan Bakar Bersubsidi didukung melalui koordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, Kabupaten/Kota, PT. Pertamina (Persero), dan HISWANA MIGAS DIY.

2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM

Permasalahan pembangunan di sektor ESDM dikaitkan dengan capaian RPJM sangat terkait dengan permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup dan juga permasalahan-permasalahan dari sektor esdm itu sendiri. Permasalahan tersebut juga terkait dengan berbagai sektor yang lain sehingga tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor esdm sendiri. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah :

- a. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lereng tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka di kerucut dan lereng atas Gunung Merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama.
- b. Perkembangan perkotaan Yogyakarta ke arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan menyebabkan resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun.
- c. Penyelenggaraan konservasi air tanah belum menjadi prioritas utama sehingga pengelolaan air tanah melalui tahapan; perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perlu ditingkatkan.
- d. Kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi, sehingga kegiatan penambangan dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan tersebut.
- e. Pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang belum memperhatikan kelestarian lingkungan
- f. Belum jelas terlihat program dan indikator manajemen dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah bahan tambang,
- g. Pencemaran air tanah meningkat yang menyebabkan air tanah ke depan tidak layak untuk dikonsumsi.
- h. Upaya pemenuhan kebutuhan energi di DIY melalui upaya penciptaan energi baru yang terbarukan, misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pemasangan pembangkit listrik tenaga surya, pembangunan pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga biogas belum maksimal;
- i. Antisipasi terhadap ketersediaan energi melalui gerakan hemat energi belum berjalan efektif;

- j. Belum ada keterkaitan jelas antar target implementasi teknologi energi terbarukan dengan capaian target bauran energi
- k. Peningkatan efisiensi energi dalam rangka pencapaian target intensitas dan elastisitas energi belum jelas alur program audit energi dan pengaruhnya terhadap efisiensi energi
- l. Belum jelas strategi audit energi yang diterapkan massal pada pengkonsumsi energi utama
- m. Belum ditetapkan benchmarking dalam audit energi untuk Yogyakarta, misalnya untuk target capaian atau keperluan insentif dan disinsentif
- n. Terdapat sejumlah pilihan teknologi energi terbarukan yang berpotensi berdampak signifikan belum disentuh scr optimal, misal land fill gas, centralized biogas powerplant, solar system for urban, cascade hydropower di jaringan irigasi
- o. Belum jelas ada jaminan bahwa teknologi energi terbarukan yang telah diimplementasikan bisa beroperasi secara sustainable
- p. Termasuk yang belum disinggung adalah penyiapan distributed generation (teknologi dan non-teknologi) yang memberi keleluasaan pada masyarakat untuk menjadi pemasok energi
- q. Masih terjadinya ketidklancaran distribusi LPG tabung 3 Kg di beberapa wilayah terpencil yang disebabkan karena belum optimalnya pengawasan dan belum meratanya sebaran penyalur/agen dan sub penyalur/pangkalan khususnya di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul;

Adapun permasalahan dan kendala dalam pembangunan bidang energi ditingkat nasional antara lain pada laju produksi minyak bumi terus menerus mengalami penurunan, disamping adanya kehilangan potensi produksi. Penurunan laju produksi terutama disebabkan oleh penurunan alamiah dari sumur-sumur yang sudah mature (tua), sedangkan penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi selanjutnya (secondary dan tertiary recovery) masih terbatas. Potensi kehilangan produksi terutama terjadi akibat keterlambatan produksi lapangan minyak baru serta kendala teknis yang bersumber dari tingkat kehandalan peralatan produksi, serta kendala non-teknis yang bersumber dari masalah perijinan penggunaan lahan.

Terkait kapasitas pembangkit listrik, tambahan kapasitas terutama diperoleh melalui program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW Tahap I. Namun

demikian, program tersebut dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan, sehingga kontribusinya terhadap penambahan kapasitas terpasang tidak sesuai dengan sasaran. Keterlambatan ini disebabkan oleh mundurnya waktu Commercial Operation Date (COD) dari beberapa proyek pembangkit karena masalah administratif, teknis, dan finansial. Sampai saat ini, proyek pembangkit 10.000 MW Tahap I yang sudah beroperasi sebesar 4.450 MW.

Kendala yang ditemui dalam pemanfaatan energi alternatif, terutama panas bumi, adalah mengenai harga dan tumpang tindih lahan. Biaya produksi dari energi alternatif cukup tinggi sehingga menyebabkan energi alternatif tidak dapat berkompetisi dengan harga energi berbasis fosil, yang masih disubsidi. Sebagian besar potensi panas bumi berada di kawasan hutan lindung/konservasi, dan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pengembangan panas bumi memerlukan waktu yang lama. Dengan demikian, pelaksanaan eksplorasi menjadi terlambat dan berdampak

pada rendahnya pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Sementara pada pemanfaatan jaringan gas kota dan SPBG yang sudah terbangun terkendala dalam hal serah terima aset kepada pengelola serta jaminan kepastian alokasi atau pasokan gas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

BAB 3

KEBIJAKAN, SASARAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM

3.1 VISI, MISI, DAN TEMA PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, Misi dan Program Calon Gubernur DIY Tahun 2012-2017 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD DIY pada tanggal 21 September 2012 dengan tema “Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru” merupakan ide dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (local genius). Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan. Perubahan paradigmatis ini paralel, bahkan terdukung oleh kebijakan ekonomi nasional dengan ditematkannya wilayah Kulonprogo dalam program MP3I (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia) berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang termasuk dalam ‘Koridor Delapan’ seluas 3.500-3.700 hektar.

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.
- 2) Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.

- 4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Tema pembangunan DIY pada tahun 2014 adalah: "Memantapkan perekonomian daerah dan stabilitas sosial politik menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera". Memantapkan perekonomian daerah dimaknai sebagai upaya mendorong kegiatan perekonomian daerah sehingga memiliki basis ekonomi yang bisa diandalkan, tidak mudah goncang (tidak mudah terombang ambing) akibat perubahan global dan perubahan nasional. Peran sektor cipta karya dalam kontribusi memantapkan perekonomian daerah juga dimaknai sebagai upaya membangun infrastruktur dasar untuk mewujudkan SDM yang unggul dan mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.

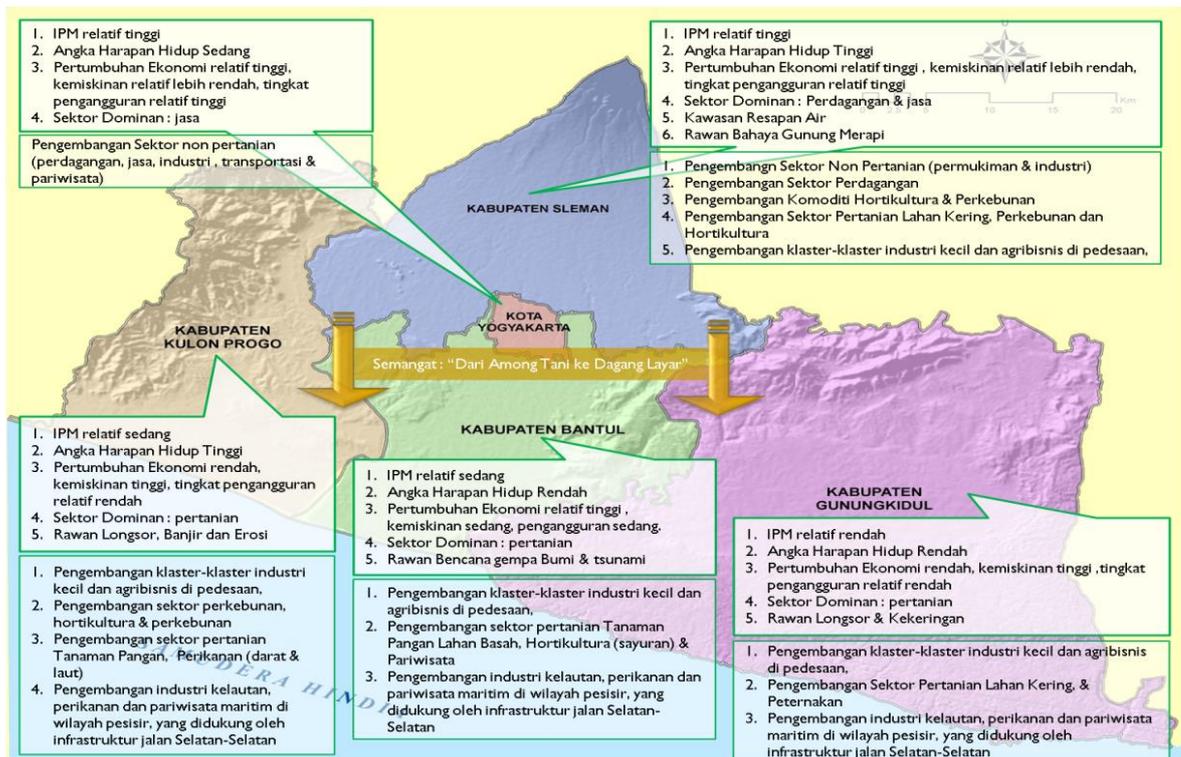
Menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera dimaknai sebagai upaya mengarahkan kepada perwujudan visi jangka menengah daerah Tahun 2013-2017. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya. Revitalisasi kawasan budaya merupakan salah satu kegiatan keciptakaryaan yang mendukung pencapaian DIY yang berkarakter dan berbudaya. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkuat budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius). Melalui program-program pengembangan kawasan baik kawasan agropolitan, minapolitan maupun kawasan strategis cepat tumbuh, sektor cipta karya akan mendukung kepada terwujudnya kondisi DIY yang maju dalam artian makmur secara ekonomi melalui pengembangan pembangunan bidang perekonomian khususnya penyediaan infrastruktur industri, perdagangan, pertanian, dan sektor lainnya. Program-program sanitasi juga akan mendukung pencapaian masyarakat yang maju dalam hal derajat kesehatan baik, harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Penguatan kelembagaan masyarakat yang mengiringi pembangunan infrastruktur keciptakaryaan diharapkan

akan dapat memandirikan masyarakat dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya (self-help), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan keciptakaryaannya yang telah dilakukan dengan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat diharapkan sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kondisi infrastruktur dasarnya.

Peran sektor ESDM dalam mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas terlihat dalam kontribusinya pada prioritas pembangunan DIY Tahun 2014 di bidang:

- 1) Infrastruktur;
- 2) Lingkungan hidup dan bencana;

Arah Pembangunan Kewilayahan DIY



Prioritas dan Sasaran tahun 2014

Sedangkan pada visi dan misi nasional pemerintah sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2010-2014, yang dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional tersebut bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu:

- 1) reformasi birokrasi dan tata kelola;
- 2) pendidikan;
- 3) kesehatan;
- 4) penanggulangan kemiskinan;
- 5) ketahanan pangan;
- 6) infrastruktur;
- 7) iklim investasi dan usaha;
- 8) energi;**
- 9) lingkungan hidup dan bencana;
- 10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta
- 11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Penjelasan lebih lanjut dari prioritas tersebut untuk sektor energi adalah sebagai berikut bahwa kebijakan pembangunan bidang energi diarahkan untuk mencapai **ketahanan dan kemandirian energi** guna menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional. Substansi inti dari kebijakan bidang energi mencakup antara lain kapasitas energi, pemanfaatan energi alternatif khususnya panas bumi, dan konversi penggunaan sumber energi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).

Sasaran yang ingin dicapai dalam kapasitas energi adalah:

- (a) Produksi minyak bumi mulai tahun 2014 sebesar 1.010 ribu barrel per hari;
- (b) Tambahan kapasitas pembangkit rata-rata 3.000 megawatt (mw) per tahun;
- (c) Rasio elektrifikasi sebesar 80 % pada tahun 2014; dan
- (d) Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi alternatif, khususnya panas bumi, mencapai 5.000 MW.

Sedangkan sasaran dalam konversi penggunaan gas adalah:

- (a) Terbangunnya jaringan gas kota di 19 kota dengan 80.000 sambungan rumah, dan;
- (b) Terbangunnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebanyak 21 unit.

Secara umum, pencapaian sasaran utama pembangunan bidang energi masih belum menggembirakan, terutama produksi minyak bumi dan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Pencapaian sasaran utama pembangunan disajikan pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Capaian Prioritas Nasional Energi

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target (2014)	Perkembangan Pencapaian			Perkiraan Capaian 2014 (notifikasi)
				2010	2011	2012	
Produksi Minyak Bumi	Ribu Barrel/Hari	949	1.010 ^{*)}	945	902	877	
Kapasitas Pembangkit	Tambahan (MW)	31.959	3.000 MW/Tahun	2.024	5.916	2.940	
	Terpasang (Kumulatif MW)			33.983	39.899	42.839	
Rasio Elektrifikasi	%	65,79	80	67,15	72,95	75,90	
Kapasitas PLTP	Terpasang (Kumulatif MW)	1.179	5.000	1.189	1.226	1.231	
Pembangunan Jaringan Gas Kota	Kota/Sambungan Rumah (Kumulatif)	2/6.210	19/80.000	6/19.376	9/45.576	14/61.576	
Pembangunan SPBG	Unit (Kumulatif)	n.a ^{**})	21	FEED ^{***})	4	8	
Keterangan: *) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1,2 juta; **) Belum ada pembangunan melalui APBN; ***) <i>Front End Engineering Design</i> .  Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Produksi minyak bumi semakin menurun karena sebagian besar berasal dari sumber minyak yang sudah menua, dan terlambatnya pembukaan sumber minyak baru.

Sedangkan Rasio Elektrifikasi dan Kapasitas Pembangkit Listrik mampu mencapai target 2014 Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW/tahun dan rasio elektrifikasi sebesar 80% pada tahun 2014 diperkirakan akan tercapai. Pada tahun 2012, rasio elektrifikasi sudah mencapai 75,90% atau mendekati target tahun 2014 sebesar 80%. Peningkatan rasio elektrifikasi didukung dengan adanya tambahan kapasitas pembangkit listrik.

Sampai Juni 2012, kapasitas pembangkit listrik mencapai 42.839 MW. Artinya, ada tambahan kapasitas sebesar 10.880 MW dibandingkan kapasitas yang ada pada tahun 2009 sebesar 31.959 MW. Panas Bumi sebagai Pemanfaatan Energi Alternatif untuk Pembangkit Listrik belum dapat dimaksimalkan. Sampai saat ini, pemanfaatan energi alternatif, terutama panas bumi, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena harganya belum kompetitif serta biaya investasi yang relatif besar, disamping adanya tumpang tindih lahan antara lapangan panas bumi dengan kawasan hutan. Potensi energi panas bumi sekitar 29.000 MW dan baru dapat dimanfaatkan untuk kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.231 MW. Kapasitas ini masih jauh lebih kecil dari yang diharapkan, yakni sekitar 4,24 % dari potensi keseluruhan dan 24,62 % dari target RPJMN sebesar 5.000 MW.

Pelaksanaan Konversi Penggunaan Gas Diperkirakan Mencapai Target Pembangunan jaringan gas kota dan SPBG dalam rangka konversi BBM ke BBG diperkirakan mencapai target sesuai dengan sasaran RPJMN. Dari rencana pembangunan jaringan gas di 19 kota dan 80.000 sambungan rumah, diperkirakan pada tahun 2014 akan terbangun di 21 kota serta 76.280 sambungan rumah. Pembangunan SPBG sampai 2014 akan mencapai target yang ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan penggunaan gas di sektor transportasi, telah diterbitkan Perpres No. 64/2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk Transportasi Jalan. Dengan adanya Perpres tersebut, implementasi penggunaan BBG diharapkan dapat lebih baik, terutama dalam peningkatan jumlah pembangunan SPBG.

Pemanfaatan panas bumi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena harganya yang belum kompetitif dan biaya investasi yang besar.

3.2 KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM

Kebijakan dan sasaran pembangunan ESDM nasional adalah untuk meningkatkan produksi minyak bumi adalah: (a) memberikan insentif optimasi produksi melalui infill drilling dan penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR); (b) mempercepat pengembangan lapangan baru termasuk pengembangan struktur idle; (c) meningkatkan kehandalan peralatan untuk mengurangi gangguan produksi (unplanned shut-down); dan (d) mempercepat penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan perijinan, keamanan, dan tumpang tindih lahan. Sedangkan untuk menyukseskan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW Tahap I adalah dengan mempercepat penyelesaian masalah melalui koordinasi yang lebih intensif. Upaya tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala pemanfaatan energi alternatif adalah: (a) amandemen UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi untuk mengakomodasi bahwa panas bumi tidak termasuk kegiatan pertambangan terkait dengan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan; (b) pemberian jaminan kelayakan usaha untuk PT PLN (Persero) untuk dapat membeli listrik yang bersumber dari panas bumi; dan (c) implementasi feed-in tariff panas bumi.

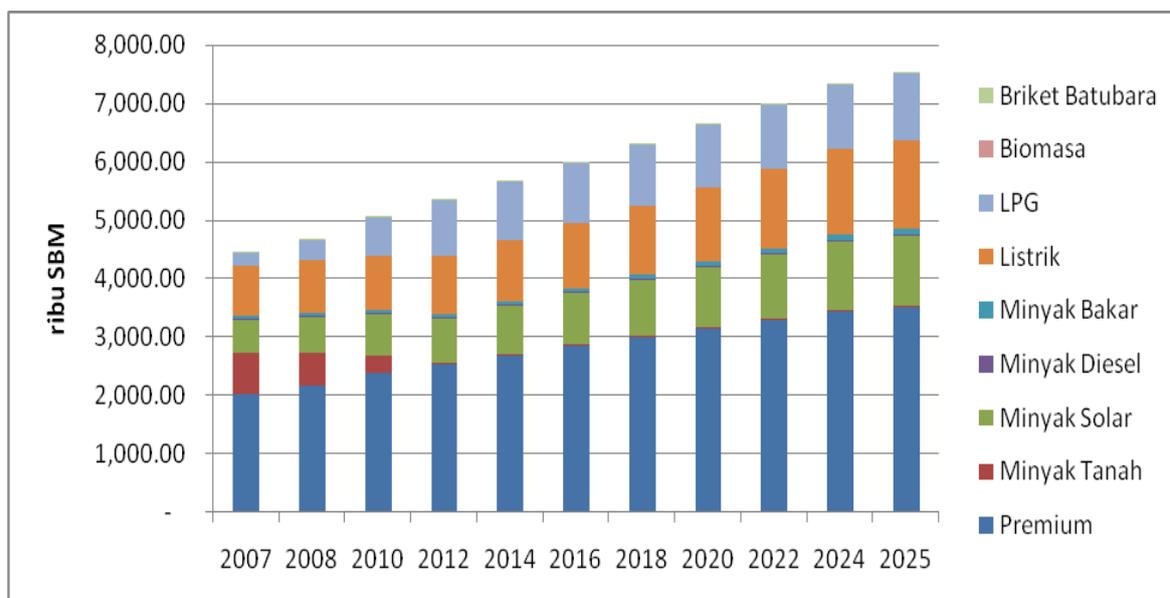
Sementara untuk proses serah terima aset dapat diselesaikan dengan mempercepat proses serah terima aset kepada pengelola dan perjanjian jual beli gas. Harga BBG yang saat ini masih relatif rendah (affordable) telah menyebabkan badan usaha belum tertarik untuk melakukan investasi SPBG. Untuk itu, guna meningkatkan minat investasi badan usaha, akan diterapkan paket insentif BBG, baik berupa insentif fiskal kendaraan BBG, pengadaan peralatan converter kit, dan infrastruktur pendukungnya maupun keringanan pajak penjualan BBG.

Dalam melakukan penyelenggaraan energi di dalam negeri pemerintah pusat telah melakukan beberapa hal baik pengambilan kebijakan, penyusunan regulasi dan bahkan perubahan paradigma. Sasaran energi nasional dapat digambarkan pada grafik berikut :

Prinsip-prinsip yang disampaikan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) antara lain adalah :

1. Pembangunan berkelanjutan;
2. Mempertimbangkan efisiensi pemakaian energi;
3. Memprioritaskan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan;
4. Kebutuhan untuk perlindungan terhadap lingkungan;

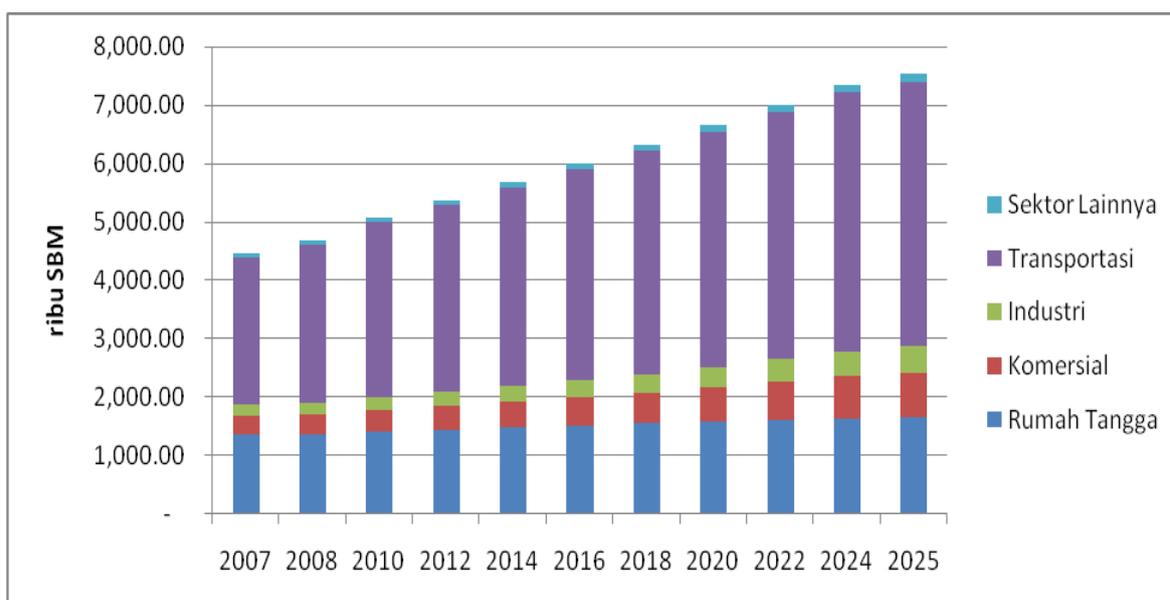
Prakiraan Kebutuhan Energi Per Jenis Energi Periode 2007-2025



Prakiraan Kebutuhan Energi Per Jenis Energi Periode 2007-2025

Jenis	Prakiraan Kebutuhan Energi (ribu SBM)								
	2007	2010	2014	2016	2018	2020	2022	2024	2025
Premium	2,030.97	2,397.04	2,713.01	2,865.58	3,018.20	3,169.28	3,317.05	3,459.57	3,528.23
Minyak Tanah	691.99	290.25	5.31	5.84	6.44	7.12	7.89	8.76	9.24
Minyak Solar	593.54	716.70	835.78	899.30	966.08	1,035.97	1,108.85	1,184.54	1,223.38
Minyak Diesel	0.33	0.37	0.45	0.49	0.55	0.60	0.67	0.74	0.78
Minyak Bakar	43.20	49.22	59.09	64.99	71.65	79.20	87.77	97.50	102.87
Listrik	863.42	937.41	1,051.95	1,117.56	1,189.85	1,269.83	1,358.69	1,457.85	1,511.79
LPG	226.29	669.18	1,008.11	1,034.14	1,059.79	1,085.06	1,109.93	1,134.43	1,146.56
Biomasa	3.33	3.36	3.38	3.38	3.38	3.38	3.37	3.35	3.34
Briket Batubara	2.72	2.77	2.84	2.87	2.89	2.91	2.93	2.94	2.95
Total	4,455.80	5,066.30	5,679.92	5,994.17	6,318.83	6,653.35	6,997.14	7,349.70	7,529.14

Prakiraan Kebutuhan Energi Per Sektor Periode 2007-2025

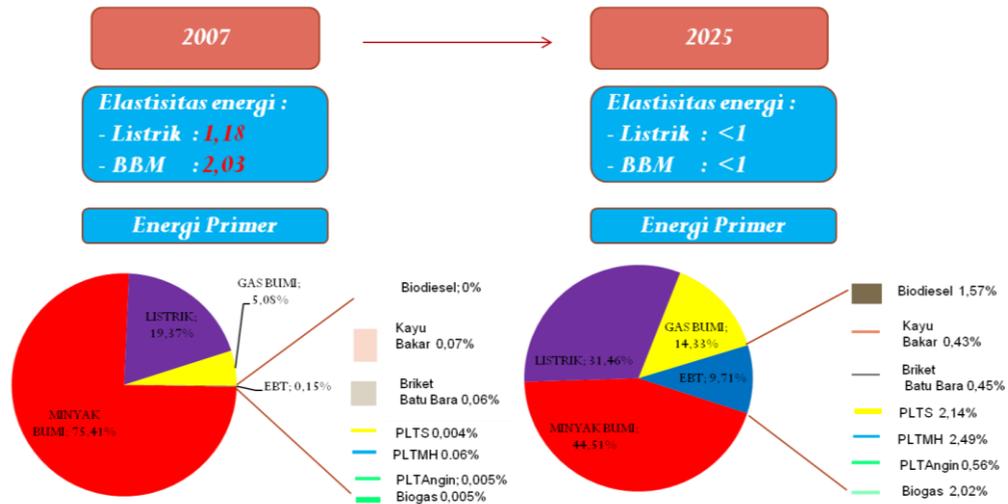


Prakiraan Kebutuhan Energi Per Sektor Periode 2007-2025

Sektor	Prakiraan Kebutuhan Energi (ribu SBM)										
	2007	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2024	2025
Rumah Tangga	1,358.73	1,377.43	1,414.20	1,450.05	1,484.85	1,518.48	1,550.84	1,581.80	1,611.26	1,639.12	1,652.41
Komersial	320.57	334.60	365.21	399.64	438.43	482.19	531.65	587.67	651.23	723.47	763.26
Industri	190.44	198.77	216.96	237.41	260.45	286.45	315.83	349.11	386.87	429.78	453.42
Transportasi	2,523.56	2,707.78	2,998.72	3,211.61	3,410.72	3,613.04	3,816.85	4,020.19	4,220.81	4,416.27	4,511.24
Sektor Lain	62.50	65.24	71.21	77.92	85.48	94.01	103.66	114.58	126.97	141.06	148.81
Total	4,455.80	4,683.81	5,066.30	5,376.64	5,679.92	5,994.17	6,318.83	6,653.35	6,997.14	7,349.70	7,529.14

Beberapa kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan energi di wilayah provinsi DIY antara lain adalah dengan menetapkan arahan perencanaan energi ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RTRW, Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum, dst.

Sasaran Kebijakan Energi Daerah



Sasaran pembangunan untuk beberapa pembangkit listrik antara lain adalah sebagai berikut :

1. PLTS

- Perkotaan
 - a. Pelanggan rumah tangga :
 - 1) Pelanggan di atas R2 dan R3
 - 2) Real estate
 - 3) Rumah susun
 - b. Pelanggan bisnis (hotel)
 - c. Pelanggan Publik (perkantoran)
 - d. Pelanggan Industri
- Perumahan di wilayah Perdesaan melalui pemanfaatan :
 - a. PLTS (SHS)

2. PLTMH

- Mengoptimalkan potensi saluran irigasi untuk pengembangan mikrohidro;
- Mengembangkan mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan energi listrik perdesaan skala kecil;

- Mengarahkan pengembangan PLTMH untuk kegiatan produktif, menambah pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja;
 - Membina bengkel-bengkel mikrohidro untuk keperluan operasi dan pemeliharaan.
3. PLT ANGIN
- Mengembangkan teknologi PLT Angin yang sederhana untuk skala mikro (500 VA – 2500 VA) secara berkelompok (wind farm)
 - Mengembangkan energi angin untuk penerangan, kegiatan produktif, pemompaan air (irigasi dan air bersih) untuk pengembangan wilayah di kawasan pantai selatan
 - Membina bengkel-bengkel PLT Angin untuk keperluan operasi dan pemeliharaan
4. BIOGAS
- Melakukan inventarisasi potensi biogas untuk dapat dikembangkan
 - Mengoptimalkan pemanfaatan limbah kotoran ternak untuk pengembangan masyarakat perdesaan
 - Mengarahkan pemanfaatan biogas menjadi energi dalam bentuk cair melalui teknologi tepat guna
 - Mendorong keterlibatan swasta dalam pengembangan biogas
 - Memanfaatkan limbah domestic di perkotaan
5. Biodiesel
- Melakukan inventarisasi potensi pengembangan bahan bakar nabati biodiesel
 - Mengarahkan pengembangan dan pemanfaatan biodiesel melalui teknologi tepat guna
 - Mendorong pengembangan biodiesel terintegrasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya maka strategi dan kebijakannya adalah:

1. Meningkatkan infrastruktur energi dalam rangka menjamin kecukupan permintaan energi di DIY;

2. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi dari jenis energi baru terbarukan;
3. Melanjutkan kebijakan peningkatan rasio elektrifikasi menuju target yang ditetapkan nasional 80% pada tahun 2014;
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas.

Sedangkan arah kebijakan energi daerah menurut dinas PUP ESDM antara lain adalah :

1. Stabilisasi penyediaan/pasokan energi (BBM, gas, dan listrik);
2. Meningkatkan kemampuan pasokan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal;
3. Mengefektifkan kelembagaan bidang energi;
4. Mengembangkan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia bidang energi;
5. Pengembangan Infrastruktur untuk Peningkatan Akses/Pelayanan Konsumen Energi.

Langkah-langkah strategis

- 1) Menyusun Peraturan Daerah di Bidang Ketenagalistrikan
 - Pemanfaatan Sumber Energi Primer
 - Peraturan mengenai Usaha Ketenagalistrikan
 - Program Listrik Pedesaan
- 2) Mendorong munculnya pelaku usaha bidang ketenagalistrikan

3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM

Berdasarkan analisa tentang kondisi umum sektor cipta karya di DIY, permasalahan yang dihadapi, serta kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian sasaran tersebut kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah n+1. Program dan kegiatan prioritas sektor cipta karya yang diusulkan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Lintas Batas
		Peningkatan Nilai Produksi Bahan Galian
		Pemetaan Geologi Teknik dan Wilayah Pertambangan
2	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH BERWAWASAN KONSERVASI	Pembangunan Sarana Pemantauan Air Tanah
		Pembinaan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah
		Pendayagunaan Air Tanah di Daerah Sulit Air
		Pemantauan dan Evaluasi Air Tanah
3	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI	Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi Terbarukan
		Pengembangan Biogas Untuk Masyarakat Pedesaan
		Penyusunan Rencana Umum Energi
		Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
4	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR	Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi
		Pemanfaatan Energi Alternatif Untuk I K M
		Pengawasan Bahan Bakar Bersubsidi
		Pengawasan Keselamatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan Usaha Bahan Bakar Dan Energi
		Pengembangan Bahan Bakar Nabati
		Penyusunan Sistem Informasi Minyak, Dan Gas Bumi Serta Bahan Bakar Lain
		Fasilitasi Ketersediaan Bahan Bakar Bersubsidi Bagi Nelayan
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Pembangunan Pembangkit Listrik
		Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan
		Peningkatan Kinerja Pengelola Bidang Energi Dan

		Ketenagalistrikan
		Perbaikan, Pemeliharaan Dan Pemindahan Pembangkit Listrik
		Penyusunan Desain Detail Jaringan Listrik Pedesaan
		Penyediaan Dan Pemenuhan Listrik

BAB 4

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi DIY yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan. Nilai PDRB DIY dengan harga konstan 2000 pada tahun 2011 adalah sebesar Rp22,129 trilyun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16% dari tahun sebelumnya, sedangkan proyeksi PDRB tahun 2012 diperkirakan masing-masing mencapai kisaran Rp22,238 trilyun - Rp23,362 trilyun. PDRB DIY diprediksikan mengalami kenaikan terus menerus sampai tahun 2014 dengan kisaran proyeksi PRDB pada 2013 dan 2014 adalah Rp24,444 trilyun-Rp24,600 trilyun dan Rp25,740 trilyun-Rp25,978 trilyun. Sementara itu prediksinya pada tahun 2015 berkisar antara Rp27,130 trilyun sampai Rp27,459 trilyun.

Selama tahun 2011, peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor konstruksi, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor penggalian. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi lebih dari seperlima PDRB, sementara itu dua sektor terkecil yaitu listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi di bawah satu persen dari PDRB.

**Tabel 4.1. Kontribusi PDRB Sektoral Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha
(Harga Konstan 2000), 2011 – 2015 (%)**

Lapangan Usaha	2011	2012*	2013*	2014*	2015*
1. Pertanian	17,00	16,23	16,04	15,82	15,54
2. Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,68	0,65	0,63	0,62
3. Industri Pengolahan	13,31	13,34	13,37	13,37	13,32
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,90	0,92	0,91	0,91	0,91
5. Konstruksi	9,75	9,86	9,90	10,02	10,10
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	20,82	21,02	21,08	21,15	21,35
7. Transportasi dan Komunikasi	10,70	10,87	10,99	11,02	11,02
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	9,80	9,91	10,01	10,05	10,07
9. Jasa-jasa	17,07	17,17	17,06	17,05	17,07
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pola struktur PDRB DIY pada tahun 2011 diproyeksikan akan terus berlanjut di masa mendatang sampai tahun 2015 mengingat perekonomian DIY masih bertumpu pada jasa pendidikan, pariwisata dan budaya. Kegiatan ekonomi di sektor tersebut menciptakan permintaan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terus tinggi. Sementara itu, sektor perdagangan DIY pada beberapa tahun mendatang akan didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor karena beberapa hal berikut: a) Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY; b) Permintaan ekspor yang terus meningkat dan diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang dan; c) Proyeksi kinerja ekonomi nasional untuk satu dasawarsa mendatang berada pada tren meningkat dengan

didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi dan pembentukan modal kerja (investasi) pada momentum era golden age angkatan kerja Indonesia.

Pertumbuhan sektor pertanian yang lambat harus menjadi salah satu fokus perhatian khusus di DIY mengingat pangsa tenaga kerja yang bergerak di sektor tersebut masih sangat besar. Pertumbuhan output sektor pertanian yang lambat dan masih tingginya jumlah tenaga kerja pertanian menyebabkan pendapatan per kapita di sektor ini tetap rendah. Rendahnya pendapatan per kapita di sektor ini dapat menjadi penghalang bagi tenaga kerja yang masih produktif dan muda untuk bergerak di sektor pertanian.

Secara makro regional kondisi internal domestik DIY yang mendukung terciptanya suasana optimis dalam proyeksi makro ekonomi Provinsi DIY adalah misi dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan good governance sebagai misi utama seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahnya. Perpaduan dari kedua faktor eksternal dan internal inilah yang diyakini akan membuat lompatan perbaikan iklim investasi sebagai penopang perekonomian makro Provinsi DIY dalam satu dasawarsa mendatang.

PENDANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM

Tabel 4.2. Pagu APBD DIY tahun 2012-2013 untuk Program-Program ESDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	APBD 2012 (Rp)	APBD 2013 (Rp)
2.03.01.00.15	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	880.100.000	696.828.672
2.03.01.00.18	Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi	2.606.731.000	3.475.000.000
2.03.01.00.20	Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Energi	979.500.000	1.776.850.000
2.03.01.00.21	Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Bahan Bakar	829.470.000	1.226.834.000
2.03.01.00.23	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan	3.520.450.000	3.669.000.000
		8,816,251,000	10,844,512,672

Meskipun terdapat kenaikan pagu pada tahun 2013 sebesar Rp 2,028,261,672.00 namun jika dilihat dari postur pendanaan untuk tiap-tiap program akan terlihat dengan jelas minimnya dukungan APBD DIY bagi pembangunan ESDM khususnya untuk subsektor energi.

Fokus belanja untuk pembangunan sektor ESDM lebih diarahkan kepada program – program pokok seperti Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan. Sementara untuk Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Energi, Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Bahan Bakar, serta Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan untuk saat ini belum menjadi prioritas. Dengan kondisi seperti ini, maka sinergitas pendanaan dari berbagai sumber lain (APBN, APBD kabupaten/kota, dll) menjadi penting dalam pemenuhan target RPJMD.

Berdasarkan KUA-PPAS APBD 2014 yang telah disusun, alokasi pendanaan pembangunan sektor ESDM mengalami kenaikan \pm 2 M dari tahun sebelumnya seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3. Pagu APBD DIY tahun 2014 untuk Program-Program ESDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	KUA PPA 2014
2.03.01.00.21	Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Bahan Bakar	600,000,000
2.03.01.00.23	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan	4,056,000,000
02.03.01.5.2.24	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan	2,982,000,000
02.03.01.5.2.25	Program Pembinaan , Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan , pendayagunaan Air Tanah	3,700,000,000
02.03.01.5.2.26	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi	600,000,000
02.03.01.5.2.27	Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan	835,000,000
		12,773,000,000

Sudah ada perubahan dalam struktur pendanaan tersebut yaitu adanya penambahan alokasi pendanaan untuk Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan sebesar Rp 1,205,150,000 menjadi Rp 2,982,000,000. Dalam postur tersebut juga terdapat pengurangan pendanaan untuk Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Bahan Bakar menjadi hampir separuhnya yaitu sebesar Rp 626,834,000. Postur pendanaan tersebut masih perlu ditambahkan pada program Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi untuk lebih mendongkrak sisi konservasi.

PERUBAHAN APBD TAHUN 2013

Berdasarkan analisa permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing sub sektor dan program kegiatan yang telah diusulkan melalui APBD 2014, terdapat beberapa catatan yang bisa diusulkan menjadi agenda perubahan APBD 2013.

Tabel 4.6. Usulan kegiatan melalui APBDP 2013

No	Sub Sektor	Indikator Target RPJMD	Usulan kegiatan melalui APBD 2013	Kondisi 2012	Target 2013
1	Program Pembinaan , Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan , pendayagunaan Air Tanah	Rerata penurunan muka air tanah	Mebutuhkan dana untuk pertemuan dalam rangka koordinasi dengan kabupaten/kota terkait dengan ijin pengusahaan air tanah yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota.	< 20 %	< 20 %
2	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pencapaian rasio elektrifikasi	Dibutuhkan perbanyak ded untuk mempercepat pencapaian ratio elektrifikasi sehingga ded yang tidak dapat di danai oleh apbd dapat segera didanai oleh apbn.	76,80%	77,40%

Usulan kegiatan yang diajukan berdasarkan sifat kemendesakannya. Untuk sub sektor air tanah usulan perubahan dilakukan terkait dengan ijin pengusahaan air tanah yang dikeluarkan oleh kab/kota terkait dengan upaya konservasi air tanah. Sedangkan untuk subsector ketenagalistrikan usulan kegiatan diajukan terkait dengan perbanyak DED dalam rangka mengejar target ratio elektrifikasi, dimana setelah DED tersebut selesai dilakukan maka selanjutnya adalah tahap pembangunan baik oleh APBD maupun APBN.

LAMPIRAN